



***Microfinance* dan Faktor Sosio-Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Cynthia Dikna Sari¹⁾; Rifka Audinasari²⁾ Fajriana Khusnul Khotimah³⁾ Puspita Maelani⁴⁾
Email Korespondensi: cynthia.dikna.sari@akuntansi.pnj.ac.id ^{1)*}

Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia^{1,2)}

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 17/07/2026

Diterima: 17/08/2026

Dipublikasikan: 21/10/2026

Akreditasi oleh

Kemdiktisaintek

No.295/C/C3/KPT/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *microfinance* (kredit mikro) dan faktor sosio-ekonomi meliputi PDRB, tingkat pendidikan, serta tingkat pengangguran terhadap kemiskinan sebagai indikator pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Analisis dilakukan pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024 menggunakan regresi data panel dengan total 170 observasi. Pemilihan model estimasi dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, yang secara konsisten menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model estimasi terbaik. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel kredit mikro ($\beta = -0,625$) dan pendidikan ($\beta = -0,079$) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Variabel tingkat pengangguran juga berpengaruh positif namun tidak signifikan, mencerminkan dominasi pekerja informal berpendapatan rendah (*working poor*). Model yang digunakan mampu menjelaskan 42,11 persen variasi tingkat kemiskinan ($R\text{-squared} = 0,4211$), dengan nilai *rho cross-section random* sebesar 0,9699 yang mengindikasikan dominasi heterogenitas antarwilayah dibandingkan variasi antarwaktu. Temuan ini menegaskan bahwa perluasan akses kredit mikro dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan instrumen kebijakan yang lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat maupun penurunan angka pengangguran terbuka. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pengentasan kemiskinan dirancang secara spesifik sesuai karakteristik wilayah (*spatially targeted*) dengan mengintegrasikan program keuangan mikro dan pendidikan secara simultan.

Kata Kunci :

Kemiskinan; Microfinance; PDRB ; SDGs

Abstract

This study aims to analyze the influence of microfinance (microcredit) and socio-economic factors including GRDP, education level, and unemployment rate on poverty as indicators of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The analysis was conducted in 34 provinces in Indonesia during the 2020-2024 period using panel data regression with a total of 170 observations. The selection of the estimation model was carried out through the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test, which consistently showed that the Random Effect Model (REM) was the best estimation model. The estimation results show that the microcredit variable ($\beta = -0.625$) and education ($\beta = -0.079$) have a negative and significant effect on the poverty rate, while the GRDP variable has a positive but insignificant effect, indicating that economic growth is not yet fully inclusive. The unemployment rate variable also has a positive but insignificant effect, reflecting the dominance of low-income informal workers (the working poor). The model used is able to explain 42.11 percent of the variation in poverty levels ($R\text{-squared} = 0.4211$), with a random cross-section rho value of 0.9699 indicating the dominance of inter-regional heterogeneity compared to inter-temporal variation. This finding confirms that expanding access to microcredit and improving the quality of education are more effective policy instruments in reducing poverty than aggregate economic growth or reducing the open unemployment rate. This study recommends that poverty alleviation policies be designed specifically according to regional characteristics (spatially targeted) by integrating microfinance and education programs simultaneously.

Keywords:

Poverty; microfinance; GRDP; SGDs



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda prioritas pembangunan global maupun nasional, sebagai mana tercermin dalam *sustainable development goals*. Berbagai kajian menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan tantangan mendasar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia lain seperti Vietnam (Duong & Nghiem, 2022; Tran, 2023). Berdasarkan perspektif SDGs juga ditekankan bahwa kemiskinan semakin dipahami sebagai persoalan multidimensi yang terkait dengan akses terhadap layanan dasar, kualitas pekerjaan, dan kerentanan rumah tangga, bukan semata-mata rendahnya pendapatan. Di tingkat makro, perluasan akses lembaga keuangan mikro (*microfinance*) secara konsisten dikaitkan dengan penurunan kemiskinan lintas negara berkembang, meskipun besaran dampaknya bervariasi tergantung kondisi kelembagaan masing-masing negara (Imai et al., 2012). Di Indonesia, *microfinance* hadir dalam berbagai bentuk kelembagaan, mulai dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi makro lintas provinsi menunjukkan bahwa keberadaan BPR sebagai instrumen *microfinance* formal berperan signifikan dalam menekan tingkat kemiskinan (Ismail et al., 2024), dan temuan

serupa juga dilaporkan pada level kabupaten/kota, misalnya pengaruh kredit BPR terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Barat (Fitri Rizkiyah & Nurhayati, 2020) serta pengaruh KUR terhadap kemiskinan di Jawa Barat dan pada sektor pertanian provinsi-provinsi termiskin Indonesia (Akbar & Amaliah, 2024; Amanda & Kunci, 2026). Pada saat yang sama, inklusi keuangan secara lebih luas turut terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan secara spasial antarprovinsi (Fakhrulrizqi & Nuraulia, 2025), serta turut berasosiasi dengan *financial deepening* yang secara konsisten menurunkan kemiskinan di tingkat provinsi (Riswana, 2026). Di Indonesia, *microfinance* masih tergolong sangat rendah akibat minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat, sehingga diperlukan penguatan edukasi secara masif, perluasan akses layanan keuangan, serta sinergi antar-pemangku kebijakan untuk meningkatkan kontribusi *microfinance* bagi perekonomian rakyat (Tang et al., 2020).

Dalam konteks kebijakan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa *microfinance* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kredit, tetapi juga sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan yang memperluas akses rumah tangga miskin terhadap layanan keuangan formal. Studi terbaru bahkan menunjukkan bahwa pada konteks tertentu, akses lembaga *microfinance* belum tentu menurunkan kemiskinan secara signifikan apabila kualitas layanan, infrastruktur, dan besaran pembiayaan masih terbatas.

Selain *microfinance*, sejumlah faktor sosio-ekonomi turut menjadi determinan penting kemiskinan di Indonesia. Faktor pendidikan dan ketenagakerjaan, seperti rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka, terbukti memengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung (Tirta & Putri, 2025; Wahed, 2023). Variabel pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga banyak diuji, meskipun hasilnya tidak selalu konsisten arahnya sebagian studi menemukan pengaruh negatif yang sesuai teori (Ria et al., 2022; Wirayudha & Prasetyia, 2024), sementara studi lain menemukan pengaruh positif yang justru mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif (Tirta & Putri, 2025). Variabel sosial non-konvensional, seperti angka kesakitan dan angka perceraian, turut diuji pengaruhnya terhadap kemiskinan (Akbar & Amaliah, 2024). Belanja pemerintah, bantuan sosial, dan pertumbuhan UMKM juga menjadi determinan yang banyak diteliti pada level provinsi maupun Provinsi (Aliyah et al., 2025; Amri, 2022; Thesia & Karmini, 2022). Penelitian terbaru juga menegaskan pentingnya pendidikan dan pengangguran sebagai faktor penentu kemiskinan di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui peran indikator pembangunan manusia. Oleh karena itu, pengaruh *microfinance* terhadap kemiskinan perlu dipahami bersama faktor-faktor struktural lain yang menentukan kapasitas rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

Meskipun literatur yang ada cukup beragam, sebagian besar studi cenderung menguji *microfinance* dan faktor sosio-ekonomi secara terpisah, pada cakupan wilayah yang berbeda-beda (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota), dan dengan metode yang bervariasi mulai dari regresi linear sederhana hingga panel dinamis. Belum banyak penelitian yang secara terintegrasi mengaitkan dampak *microfinance* bersama faktor sosio-ekonomi lainnya secara komprehensif terhadap pencapaian target SDGs penghapusan kemiskinan di Indonesia. Variabel *microfinance* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai akumulasi volume penyaluran kredit usaha mikro oleh lembaga keuangan (perbankan) kepada pelaku usaha mikro pada tingkat provinsi. Celah riset ini menjadi penting karena pencapaian SDGs menuntut pendekatan lintas sektor, sehingga analisis yang hanya berfokus pada satu instrumen kebijakan berpotensi menghasilkan rekomendasi yang parsial. Selain itu, bukti empiris yang berbeda-beda menunjukkan bahwa efektivitas *microfinance* sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan dukungan kebijakan yang melingkupinya, sehingga analisis terintegrasi menjadi semakin relevan untuk dirumuskan dalam kerangka pembangunan nasional. Penelitian ini secara mendalam mengambil fokus temporal pada periode 2020–2024. Pemilihan periode ini menawarkan argumentasi kontekstual yang kuat, yaitu menguji resiliensi kredit mikro perbankan serta kebijakan pemulihan ekonomi nasional sejak guncangan pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan. Selain itu, rentang 2020–2024 merupakan momentum paruh waktu (*mid-term*) yang sangat krusial untuk mengevaluasi percepatan pencapaian target SDGs 2030 di Indonesia.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara empiris dampak microfinance dan faktor sosio-ekonomi terhadap pencapaian target SDGs kemiskinan di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus masukan kebijakan yang lebih terintegrasi bagi upaya pengentasan kemiskinan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Hubungan *Microfinance* (Kredit) terhadap Kemiskinan

Secara teoritis, hubungan antara akses keuangan dan pengentasan kemiskinan dipijakkan pada *Financial Inclusion Theory* (Teori Inklusi Keuangan) sebagai *Grand Theory*, yang ditopang oleh *Vicious Cycle of Poverty Theory* (Teori Lingkaran Setan Kemiskinan) dari Ragnar Nurkse. *Financial Inclusion Theory* menegaskan bahwa aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal khususnya kredit merupakan instrumen fundamental untuk melonggarkan hambatan likuiditas (*liquidity constraints*) yang dialami kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa akses pembiayaan, masyarakat miskin akan terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle*), di mana pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tabungan dan pembentukan modal, yang pada akhirnya membatasi kapasitas produksi serta agregat permintaan pasar.

Akses pembiayaan mikro memberikan modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan skala produksinya. Berdasarkan penelitian (Sulaeman, 2024), kemiskinan terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan membatasi kapasitas produktif masyarakat serta memperkecil agregat permintaan pasar. Oleh karena itu, kebijakan intervensi berupa penyaluran kredit mikro diharapkan mampu memberikan stimulus modal bagi kelompok masyarakat rentan untuk membangun usaha produktif. Temuan studi terbaru di Indonesia lainnya juga menunjukkan bahwa dampak pembiayaan mikro tidak selalu signifikan pada semua konteks provinsi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas lembaga, skala pembiayaan, dan jangkauan layanan (Ismail et al., 2024).

Chikwira et al. (2022) menguji peran lembaga keuangan mikro (*Microfinance Institutions*/MFIs) terhadap pengentasan kemiskinan di Zimbabwe dengan menerapkan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) pada data deret waktu triwulanan periode 2009–2019. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan antara kemiskinan, kredit mikro, pertumbuhan UMKM, dan sektor pertanian. Namun, berlawanan dengan ekspektasi teoretis secara umum, temuan jangka panjang menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit lembaga keuangan mikro justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran kredit mikro yang tidak memadai atau tidak tepat guna berisiko memicu dampak yang tidak diinginkan. Di sisi lain, pengembangan UMKM dan pertumbuhan sektor pertanian terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, peningkatan pertumbuhan UMKM berperan efektif mengentaskan kemiskinan, sementara kemiskinan itu sendiri menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan pinjaman kredit mikro.

H1. Penyaluran Kredit (*Microfinance*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan

Secara teoritis, pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan dipijakkan pada *Neoclassical Growth Theory* (Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan), yang sering dikaitkan dengan konsep *Trickle-Down Effect Hypothesis* serta didukung oleh *Inclusive Growth Theory*. *Neoclassical Growth Theory* menjelaskan bahwa akumulasi modal dan output total (PDRB) merupakan pendorong utama ekspresi perekonomian. Dalam kerangka *Trickle-Down Effect*, pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDRB diasumsikan akan berdampak ke lapisan masyarakat bawah melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan akumulasi pendapatan per kapita, serta penguatan agregat permintaan barang dan jasa.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita daerah memiliki hubungan erat dan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara berlawanan arah (negatif). PDRB yang menggambarkan nilai bersih barang dan jasa dari seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah berperan penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Temuan serupa disampaikan oleh (Thesia & Karmini, 2022) dalam lingkup regional Bali, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan nilai PDRB mencerminkan penguatan pendapatan daerah yang memungkinkan ketersediaan lapangan kerja serta penunjang fasilitas ekonomi, sehingga mampu menekan angka kemiskinan masyarakat.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi daerah sering kali diposisikan sebagai prasyarat utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjamin penurunan angka kemiskinan jika tidak didukung oleh fondasi pembangunan yang berkualitas. Berdasarkan kajian (Prasetyo & Kistanti, 2020), kebijakan pemerintah yang hanya berorientasi pada mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa memperkuat kapasitas fundamental seperti modal manusia (human capital) dan kewirausahaan seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam kajian empiris mengenai kemiskinan peningkatan PDRB memperluas kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sejalan dengan temuan (Aurellia & Sirait, 2026) yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB secara simultan mampu mereduksi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, PDRB dapat menekan kemiskinan, tetapi efeknya bergantung pada apakah pertumbuhan tersebut inklusif atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

H2. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hubungan Pendidikan terhadap Kemiskinan

Hubungan kausalitas antara tingkat pendidikan dan penurunan tingkat kemiskinan dipijakkan pada *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia) yang dipelopori oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, serta didukung oleh *Social Mobility Theory* (Teori Mobilitas Sosial). *Human Capital Theory* menegaskan bahwa pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan merupakan bentuk investasi modal individual yang secara langsung meningkatkan kualitas, kapasitas adaptasi, serta produktivitas marginal tenaga kerja. Dalam kerangka ini, peningkatan tingkat pendidikan akan ditransformasikan menjadi peningkatan efisiensi kerja yang pada gilirannya menaikkan nilai tawar dan tingkat upah (*wage return*) di pasar tenaga kerja.

Upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pilar Tanpa Kemiskinan (SDGs 1) dan Pendidikan Berkualitas (SDGs 4), secara teoritis dan empiris saling berkaitan erat. Pendidikan berperan sebagai fondasi modal manusia (human capital) yang meningkatkan produktivitas dan kapasitas adaptasi tenaga kerja terhadap peluang ekonomi baru. Secara teoritis, tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya keterampilan tenaga kerja (*skill shortages*) merupakan salah satu pemicu utama tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan (Tran, 2023) mengonfirmasi bahwa investasi pada sektor pendidikan khususnya yang didukung oleh skema pembiayaan/pinjaman pendidikan memiliki hubungan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan (*poverty headcount ratio*) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akses pembiayaan pendidikan membantu menciptakan modal manusia (*human capital*) yang lebih produktif, yang pada akhirnya memfasilitasi keterlibatan masyarakat miskin dalam pasar kerja profesional dan mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga strategi ekonomi untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan mobilitas pendapatan rumah tangga.

H3. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

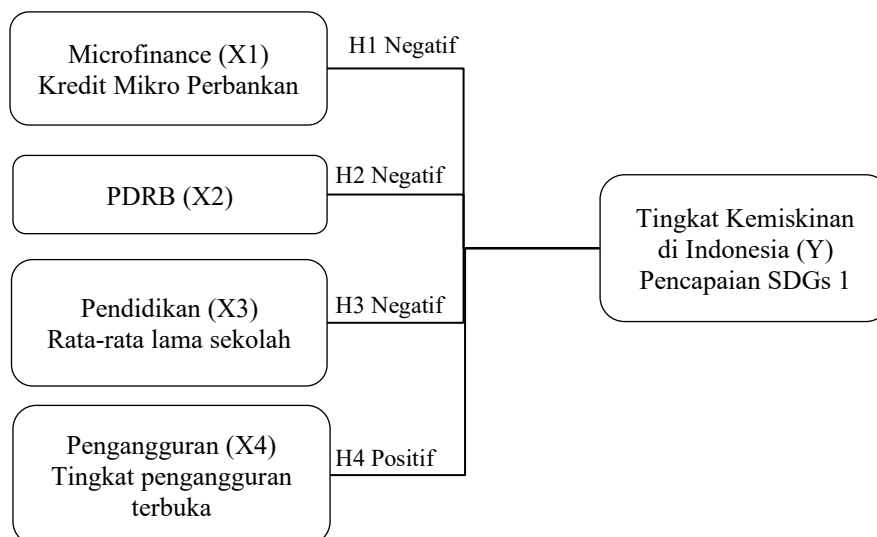
Dampak pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dipijakkan pada *Efficiency Wage Theory* (Teori Upah Efisiensi) dan *Labor Market Segmentation Theory* (Teori Segmentasi Pasar Kerja), serta didukung oleh konsep *Hysteresis Effect* dalam ketenagakerjaan. *Efficiency Wage Theory* dan teori segmentasi pasar kerja menjelaskan bahwa kegagalan penyerapan tenaga kerja menciptakan hambatan struktural yang menghalangi individu berpenghasilan rendah untuk mengakses pekerjaan layak. Kondisi pengangguran secara langsung memutuskan sumber arus kas (*income stream*) rumah tangga, yang dalam jangka panjang memicu terjadi hilangnya keterampilan, penurunan daya saing, serta degradasi nilai modal manusia akibat terlalu lama berada di luar pasar kerja.

Pengangguran jangka panjang tidak hanya berdampak pada aspek finansial secara langsung, tetapi juga merusak kualitas modal manusia (*human capital*). Pengangguran berpotensi menghilangkan keterampilan, pengalaman kerja, serta produktivitas tenaga kerja (khususnya generasi muda), yang menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan multidimensional. Penelitian empiris oleh (Alisjahbana & Manning, 2006) menunjukkan bahwa status ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap tingkat kemiskinan keluarga. Rumah tangga yang kepala keluarganya menganggur atau berada di luar angkatan kerja memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan atau kategori *near-poor* (hampir miskin) dibandingkan dengan mereka yang bekerja penuh di sektor non-pertanian. Fenomena ini mempertegas pentingnya pencapaian target SDG 8 (Pekerjaan Layak) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia (SDG 1). Dengan demikian, pengangguran tidak hanya mencerminkan lemahnya penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menandakan rentannya pendapatan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi.

Temuan empiris dari (Sulaeman, 2024) menegaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan bertindak sebagai penghambat utama pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Pengangguran berulang merusak potensi produktivitas tenaga kerja dan memicu hilangnya keterampilan (*skill loss*), sementara tingkat kemiskinan mereduksi modal manusia (*human capital*). Interaksi negatif dari kedua variabel ini menuntut adanya intervensi kebijakan publik yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja padat karya.

H4. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan menguji hipotesis mengenai dampak *microfinance* (kredit) dan faktor sosio-ekonomi (PDRB, pendidikan, dan pengangguran) terhadap target SDGs kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di suatu provinsi pada tahun tertentu	Persen (%)	BPS
Kredit Mikro (X1)	Jumlah penyaluran kredit usaha mikro oleh lembaga keuangan (perbankan) kepada pelaku usaha mikro di suatu Provinsi, dinyatakan dalam bentuk logaritma natural untuk menyeragamkan skala data	Ln Rupiah (Ln Rp)	Bank Indonesia/OJK
PDRB (X2)	Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan yang mencerminkan nilai total output perekonomian suatu provinsi dinyatakan dalam bentuk logaritma natural	Ln Rupiah (Ln Rp)	BPS
Tingkat Pendidikan (X3)	Rata-rata lama sekolah (<i>mean years of schooling</i>) penduduk usia 25 tahun ke atas di suatu provinsi	Persen (%)	BPS
Tingkat Pengangguran (X4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja di suatu provinsi	Persen (%)	BPS

Sumber : Data diolah penulis

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) provinsi memiliki data lengkap dan tersedia secara konsisten untuk seluruh variabel penelitian (kemiskinan, kredit mikro, PDRB, pendidikan, dan pengangguran) selama periode 2020–2024; (2) data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) sehingga terjamin validitas dan reliabilitasnya; serta (3) tidak terdapat perubahan wilayah administratif (pemekaran/penggabungan daerah) selama periode penelitian yang dapat menyebabkan data tidak dapat diperbandingkan (*incomparable*).

Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 34 provinsi di Indonesia memenuhi syarat dan digunakan sebagai sampel penelitian (sensus/total sampling terhadap populasi provinsi), dengan rentang waktu pengamatan 5 tahun (2020–2024), yang memenuhi syarat estimasi regresi data panel dan memberikan variasi data yang memadai baik secara *cross-section* (antarprovinsi) maupun *time-*

series (antartahun). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh data runtun waktu dan lintas ruang yang telah dipublikasikan secara legal melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan Bank Indonesia (www.bi.go.id). Data yang diperoleh kemudian ditabulasi menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan software ekonometrika *EViews*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel. Penggunaan data panel memberikan keuntungan berupa jumlah observasi yang lebih besar, meminimalkan kolinearitas antar variabel, serta mampu mengontrol heterogenitas antar individu/wilayah.

Persamaan model matematis regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Tingkat Kemiskinan provinsi ke- i pada tahun ke- t

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

$\ln X1_{it}$ = Logaritma Natural Kredit mikro provinsi ke- i pada tahun ke- t

$\ln X2_{it}$ = Logaritma Natural PDRB provinsi ke- i pada tahun ke- t

$X3_{it}$ = Tingkat Pendidikan provinsi ke- i pada tahun ke- t

$X4_{it}$ = Tingkat Pengangguran provinsi ke- i pada tahun ke- t

i = Entitas lintas ruang (*cross-section* / provinsi)

t = Periode waktu (*time series* / tahun)

e_{it} = Komponen error (*error term*)

Dalam regresi data panel, terdapat tiga jenis model estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik dan paling efisien, dilakukan tiga tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier serta uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis pengaruh kredit mikro (kredit), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan dengan pendekatan regresi data panel yang menggabungkan data 34 Provinsi selama lima periode pengamatan (2020–2024), sehingga diperoleh 170 observasi. Hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
Kemiskinan	1,78	1,21	0,50	6,25
Ln Kredit Mikro	11,18	1,18	9,20	14,53
Ln PDRB	12,53	1,13	10,64	15,12

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
Pendidikan	96,76	3,58	77,90	99,81
Pengangguran	5,11	1,73	1,79	10,95

Sumber : Hasil olah data panel Eviews, 2026

Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 1,78 persen dengan standar deviasi 1,21. Nilai terendah sebesar 0,50 persen dan tertinggi 6,25 persen, menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemiskinan yang cukup lebar antarprovinsi selama periode pengamatan. Variabel Ln Kredit Mikro menunjukkan rata-rata sebesar 11,18 dengan standar deviasi 1,18. Rentang nilai berada antara 9,20 hingga 14,53. Jika dikembalikan ke bentuk aslinya, nilai ini setara dengan kisaran ribuan hingga puluhan ribu miliar rupiah penyaluran kredit BPR, yang menunjukkan perbedaan signifikan skala penyaluran kredit mikro antarprovinsi. Variabel Ln PDRB memiliki rata-rata sebesar 12,53 dengan standar deviasi 1,13, dengan nilai minimum 10,64 dan maksimum 15,12. Rentang ini mencerminkan kesenjangan aktivitas ekonomi yang cukup besar antarwilayah, sejalan dengan perbedaan struktur ekonomi antarprovinsi di Indonesia. Variabel tingkat pendidikan memiliki rata-rata cukup tinggi yaitu 96,76 dengan standar deviasi 3,58. Nilai berkisar antara 77,90 hingga 99,81, menunjukkan bahwa capaian pendidikan di sebagian besar provinsi sudah relatif tinggi, meskipun masih terdapat provinsi dengan nilai jauh di bawah rata-rata. Variabel tingkat pengangguran memiliki rata-rata sebesar 5,11 persen dengan standar deviasi 1,73. Nilai terendah sebesar 1,79 persen dan tertinggi 10,95 persen, menunjukkan variasi kondisi ketenagakerjaan yang cukup besar antarprovinsi. Secara umum, nilai standar deviasi tiap variabel yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa sebaran data relatif homogen (tidak terlalu fluktuatif secara ekstrem) antarprovinsi maupun antarwaktu, sehingga data cukup representatif untuk dianalisis lebih lanjut dengan model regresi data panel.

Sebelum koefisien regresi diinterpretasikan, tahap yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah menentukan model estimasi yang paling sesuai dengan struktur data di antara tiga alternatif, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketepatan pemilihan model ini penting karena kesalahan spesifikasi dapat menghasilkan estimator yang bias maupun tidak efisien, yang pada akhirnya menyesatkan interpretasi mengenai determinan kemiskinan. Pemilihan model dilakukan secara berjenjang melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan kelayakan *Common Effect Model* terhadap *Fixed Effect Model*, dengan hipotesis nol yang menyatakan bahwa intersep bersifat homogen antarwilayah (CEM lebih tepat). Nilai probabilitas *Cross-section F* yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan penolakan hipotesis nol.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Uji	Statistik Uji	df	Probabilitas	Keputusan
Chow (<i>Cross-section F</i>)	145,9667	(33,132)	0,0000	H0 ditolak; FEM > CEM

Sumber : Hasil olah data panel Eviews, 2026

Uji Hausman

Setelah *Fixed Effect Model* terbukti lebih unggul dibandingkan *Common Effect Model*, tahap berikutnya adalah membandingkan *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* melalui Uji Hausman. Hipotesis nol pada pengujian ini menyatakan bahwa efek individu tidak berkorelasi dengan variabel bebas, sehingga *Random Effect Model* merupakan model yang lebih efisien.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistik</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	6,5173	4	0,1637

Sumber : Hasil olah data panel Eviews, 2026

Nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,1637 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol gagal ditolak. Dengan hasil ini, *Random Effect Model* dinyatakan lebih tepat digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model*. Secara statistik, tidak ditemukan cukup bukti bahwa efek spesifik wilayah berkorelasi dengan keempat variabel bebas (kredit, PDRB, pendidikan, dan pengangguran), sehingga estimasi dengan komponen *error* acak (*random error component*) lebih efisien dan tidak kehilangan derajat kebebasan akibat penambahan variabel dummy sebagaimana pada *Fixed Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier

Untuk memastikan pilihan antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*, dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* dengan pendekatan Breusch-Pagan. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak terdapat efek *cross-section* maupun efek waktu (CEM lebih tepat).

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

<i>Uji Breusch-Pagan</i>	<i>Cross-section</i>	<i>Test Hypothesis</i>	<i>Both</i>
Statistik	304,0823	1,5798	305,6622
Probabilitas	0,0000	0,2088	0,0000

Sumber : Hasil olah data panel Eviews, 2026

Nilai probabilitas untuk komponen *cross-section* sebesar 0,0000 ($< 0,05$) menyebabkan hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat efek *cross-section* yang signifikan dalam model. Dengan demikian, *Random Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Adapun komponen time menunjukkan probabilitas 0,2088 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa variasi antar waktu relatif tidak signifikan dibandingkan variasi antarwilayah. Kondisi ini wajar mengingat rentang waktu penelitian yang relatif pendek (lima tahun) sehingga perbedaan struktural antar Provinsi jauh lebih dominan dibandingkan perubahan dari tahun ke tahun.

Model Tepilih

Ketiga tahap pengujian di atas menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan saling menguatkan. Uji Chow menunjukkan *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*; Uji Hausman menunjukkan *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*; dan Uji Lagrange Multiplier menegaskan bahwa *Random Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*. Dengan demikian, *Random Effect Model* (REM) ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dan digunakan sebagai dasar interpretasi pada penelitian ini. Dalam analisis regresi data panel, khususnya dengan metode estimasi *Generalized Least Squares* (GLS) pada *Random Effect Model*, uji normalitas bukan merupakan syarat mutlak (BLUE) yang harus dipenuhi, karena berdasarkan teorema limit pusat (*Central Limit Theorem*), dengan jumlah observasi yang cukup besar ($n = 170$, di atas 30), estimator tetap dapat dianggap mendekati normal secara asimtotik. Pengujian asumsi klasik lainnya seperti Heterokedastisitas dan Autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM), yang diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS).

Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Estimasi *Random Effect Model* dilakukan menggunakan metode *Panel Estimated Generalized Least Squares* (EGLS) dengan estimator Swamy dan Arora untuk komponen varians. Hasil estimasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C (Konstanta)	12,1123	1,9131	6,3312	0,0000
X1_Kredit	-0,6254	0,2082	-3,0035	0,0031*
X2_PDRB	0,3388	0,1910	1,7741	0,0779
X3_Pendidikan	-0,0792	0,0147	-5,3880	0,0000*
X4_Pengangguran	0,0169	0,0212	0,7966	0,4268

Sumber: hasil olah data panel Eviews, 2026. *signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan koefisien pada model di atas, persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 12,1123 - 0,6254 \text{ Kredit} + 0,3388 \text{ PDRB} - 0,0792 \text{ Pendidikan} + 0,0169 \text{ Pengangguran} + \epsilon_{it}$$

Nilai konstanta sebesar 12,1123 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel bebas bernilai nol, tingkat kemiskinan diprediksi berada pada titik dasar tersebut, yang mencerminkan kondisi struktural kemiskinan yang tidak dapat dijelaskan oleh keempat variabel dalam model. Kelayakan model dapat dilihat dari nilai F-statistik sebesar 30,0029 dengan probabilitas 0,0000 ($< 0,05$), yang berarti secara simultan keempat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai *R-squared* sebesar 0,4211 mengindikasikan bahwa 42,11 persen variasi tingkat kemiskinan antar wilayah dan antar waktu dapat dijelaskan oleh kredit, PDRB, pendidikan, dan pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 57,89 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kondisi geografis, kebijakan perlindungan sosial, atau tingkat inflasi daerah. Nilai *rho* pada komponen *cross-section* random sebesar 0,9699 menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik antarwilayah dibandingkan oleh guncangan jangka pendek, yang menegaskan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat kewilayahan (*spatially targeted*).

Pembahasan

Pengaruh Kredit Mikro terhadap Kemiskinan

Variabel kredit (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,6254 pada probabilitas 0,0031. Karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$, maka variabel kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap kenaikan alokasi kredit sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,6254 persen, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

Arah hubungan ini konsisten dengan teori intermediasi keuangan dan gagasan keuangan mikro (*microfinance*) yang dipelopori oleh konsep Grameen Bank, yang menempatkan akses pembiayaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Ketika kelompok rentan memperoleh akses kredit produktif, mereka memiliki modal untuk memulai atau mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan sehingga keluar dari garis kemiskinan.

Apriliyani (2024) membuktikan bahwa penurunan suku bunga kredit mikro berdampak positif terhadap kinerja pembayaran UMKM serta mendukung tujuan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Penguatan lembaga keuangan mikro melalui pendekatan struktural dan kultural dapat dilakukan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Heriyanto & Mariyanti, 2022). Rusiadi et al. (2025) menemukan bahwa kebijakan moneter hijau berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan digital dan kinerja keuangan UMKM, yang pada gilirannya menurunkan kemiskinan hijau di Indonesia. Secara struktural, jelas diperlukan good will pemerintah untuk memihak kepada yang lemah. Dalam konteks inilah, good will pemerintah untuk sepenuh hati membuka kesempatan yang adil kepada yang lemah guna mendapatkan akses keuangan (*capital*) dan pelayanan pembangunan menjadi faktor amat penting bagi penghapusan kemiskinan (Prapti NSS et al., 2019).

Kajian empiris mengenai peran lembaga keuangan mikro di negara berkembang, yang umumnya menemukan bahwa perluasan akses kredit mikro berasosiasi dengan penurunan angka kemiskinan, meskipun besaran dampaknya bervariasi tergantung pada kualitas penyaluran dan pendampingan usaha. Konsistensi arah hubungan pada penelitian ini memperkuat argumen bahwa kredit bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan juga instrumen pembangunan ekonomi wilayah, khususnya apabila diarahkan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak kabupaten/kota. Dari sisi kebaruan, hasil ini menegaskan bahwa di antara empat determinan yang diuji, kredit merupakan variabel yang paling konsisten dan signifikan memengaruhi kemiskinan, sehingga memberikan indikasi bahwa perluasan inklusi keuangan dapat menjadi instrumen kebijakan yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi agregat.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Variabel PDRB (X2) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,3388, namun tidak signifikan secara statistik pada taraf 5% (probabilitas 0,0779). Arah koefisien ini berlawanan dengan hipotesis teori pertumbuhan ekonomi konvensional yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan PDRB akan menurunkan kemiskinan melalui efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*). Ketidakesesuaian arah maupun tidak signifikannya hubungan ini justru menjadi temuan yang relevan untuk didiskusikan lebih lanjut, karena mengindikasikan adanya gejala pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif (*jobless growth*) di wilayah penelitian.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif ketimpangan distribusi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa pada tahap tertentu pertumbuhan ekonomi dapat disertai peningkatan ketimpangan sebelum akhirnya menurun. Apabila pertumbuhan PDRB lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal dibandingkan sektor padat karya, atau terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta dinikmati oleh kelompok berpendapatan rendah.

Kondisi ini konsisten dengan temuan Duong & Nghiem (2022) melalui analisis panel dinamis di Vietnam menunjukkan bahwa akses microfinance secara signifikan meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga, meskipun belum tentu cukup untuk mengeluarkan rumah tangga dari kemiskinan. Penelitian di negara berkembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak otomatis menurunkan kemiskinan tanpa disertai kebijakan redistribusi dan pemerataan yang memadai. Temuan ini memberikan kebaruan dalam konteks penelitian ini, yaitu menegaskan bahwa peningkatan PDRB daerah tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan, dan perlu diimbangi dengan intervensi langsung seperti perluasan akses kredit mikro dan pendidikan.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Variabel pendidikan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien -0,0792 pada probabilitas 0,0000. Nilai t-statistik yang besar (-5,3880) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan variabel dengan tingkat signifikansi tertinggi di antara seluruh variabel bebas dalam model. Artinya, semakin tinggi capaian pendidikan masyarakat di suatu wilayah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hasil ini konsisten dengan teori human capital

yang dikemukakan oleh Becker maupun kerangka pembangunan ekonomi Todaro dan Smith, yang menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas peluang kerja pada sektor bernilai tambah lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Konsistensi arah dan tingginya signifikansi variabel ini memperkuat temuan berbagai penelitian terdahulu bahwa pendidikan merupakan determinan struktural kemiskinan yang bekerja dalam jangka panjang, berbeda dengan kredit yang cenderung memberikan dampak lebih cepat namun bersifat lebih rentan terhadap risiko usaha. Kombinasi keduanya, jika dikelola secara terintegrasi, berpotensi menghasilkan efek pengentasan kemiskinan yang saling memperkuat: pendidikan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sementara kredit menyediakan modal untuk memanfaatkan kapasitas tersebut secara produktif. Inilah salah satu unsur kebaruan penelitian ini, yakni menunjukkan secara empiris bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif idealnya menggabungkan intervensi pada sisi penawaran (peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan) dan sisi permintaan modal (penyediaan akses kredit), bukan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro.

Efek pengentasan kemiskinan yang saling memperkuat antara pendidikan dan akses finansial ini konsisten dengan temuan (Tran, 2023). Tran (2023) menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan salah satu instrumen, melainkan membutuhkan integrasi antara pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan perluasan inklusi keuangan/kredit mikro. Temuan ini memperkuat novelty penelitian ini, di mana strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif harus menggabungkan intervensi sisi penawaran (peningkatan kualitas SDM via pendidikan) dan sisi permintaan modal (penyediaan kredit), sehingga kapasitas SDM yang tinggi dapat dimanfaatkan secara produktif melalui ketersediaan modal kerja.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Variabel pengangguran (X4) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,0169, namun tidak signifikan secara statistik (probabilitas 0,4268). Arah koefisien ini sesuai dengan ekspektasi teori, yaitu peningkatan pengangguran seharusnya berasosiasi dengan peningkatan kemiskinan karena hilangnya sumber pendapatan rumah tangga. Namun demikian, tidak signifikannya hubungan ini secara statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan riil masyarakat di tingkat provinsi.

Kondisi ini sejalan dengan karakteristik pasar kerja di banyak daerah berkembang, di mana sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan rendah, sehingga seseorang dapat tercatat sebagai 'bekerja' namun tetap berada dalam kondisi miskin (*working poor*). Fenomena *underemployment* semacam ini menjelaskan mengapa indikator pengangguran terbuka kerap tidak sensitif dalam menangkap variasi kemiskinan antarwilayah, berbeda dengan variabel kredit dan pendidikan yang secara langsung memengaruhi kapasitas produktif dan pendapatan riil masyarakat. Implikasinya, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran terbuka, tetapi perlu lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan, misalnya melalui pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan penyaluran kredit usaha mikro. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sulaeman (2024) yang menyatakan bahwa dinamika pasar kerja di daerah berkembang sering kali diwarnai oleh dominasi sektor informal dan masalah produktivitas tenaga kerja. Dalam kondisi demikian, sebagian besar angkatan kerja terserap pada pekerjaan informal bertingkat pendapatan rendah, sehingga seseorang tergolong bekerja namun tetap berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menjelaskan mengapa penurunan pengangguran terbuka tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan angka kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan.

Hasil statistik dalam penelitian ini sejalan dengan kajian empiris yang dilakukan oleh Alisjahbana & Manning (2006) mengenai dimensi pasar tenaga kerja dan kemiskinan di Indonesia. Dalam studinya, Alisjahbana dan Manning menemukan bahwa status pengangguran terbuka khususnya

pada kelompok usia produktif dan pasangan kepala rumah tangga tidak memiliki hubungan yang dominan atau signifikan secara statistik terhadap status kemiskinan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pengangguran terbuka di negara berkembang seperti Indonesia sering kali lebih menggambarkan fenomena tenaga kerja terdidik atau kelompok yang masih memiliki daya tahan finansial (kemampuan menunggu pekerjaan yang cocok), bukan indikator riil dari kesejahteraan masyarakat miskin. Bagi kelompok masyarakat miskin, bertahan hidup tanpa bekerja bukanlah suatu pilihan. Oleh karena itu, masalah utama yang memicu kemiskinan di tingkat daerah bukanlah pengangguran terbuka, melainkan setengah pengangguran serta keterlibatan pekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan upah yang sangat rendah (seperti sektor pertanian tradisional dan buruh kasar). Ketidakmampuan indikator pengangguran terbuka resmi dalam menangkap kondisi kesejahteraan riil ini menjelaskan mengapa peningkatan angka pengangguran dalam model estimasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan daerah.

Pembahasan Umum dan Kebaruan Temuan

Secara keseluruhan, hasil estimasi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa dari empat variabel yang diuji, kredit dan pendidikan merupakan determinan yang paling konsisten dan signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antar provinsi, sedangkan PDRB dan pengangguran belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Pola ini memberikan gambaran penting bagi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu bahwa instrumen mikro yang menysasar langsung kapasitas rumah tangga, seperti akses pembiayaan mikro dan peningkatan kualitas pendidikan, terbukti lebih efektif dibandingkan indikator makroekonomi agregat seperti pertumbuhan PDRB maupun tingkat pengangguran terbuka.

Dalam upaya mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, khususnya Pilar Pembangunan Ekonomi dan Sosial (seperti Tanpa Kemiskinan/SDG 1 dan Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi/SDG 8), integrasi kebijakan makro dan mikro sangat diperlukan. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas tinggi dalam merancang program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan lokal untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat (Komang & I Wayan Sudemen, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penguatan akses permodalan masyarakat berpendapatan rendah melalui inovasi microfinance komersial yang mandiri terbukti efektif meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong ketercapaian target SDGs secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi pemerintah (Firmansyah & Mardiyah, 2026).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dimensi keuangan mikro, human capital, dan kondisi makro-ketenagakerjaan secara simultan dalam satu model panel, sehingga dapat memperlihatkan pengaruh relatif masing-masing determinan terhadap kemiskinan pada periode 2020–2024, yaitu periode yang mencakup masa pemulihan pasca pandemi. Temuan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan pada periode tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi makro pasca pandemi belum sepenuhnya inklusif dan belum secara otomatis menetes ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga intervensi yang lebih terarah seperti perluasan kredit mikro dan peningkatan akses pendidikan menjadi semakin relevan sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif terhadap kondisi pasca pandemi. Nilai rho *cross-section* random yang tinggi (0,9699) turut memperkuat argumen bahwa kebijakan yang bersifat seragam secara nasional berpotensi kurang efektif, dan perlu diarahkan secara lebih spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Ringkasan perbandingan antara arah hasil estimasi dengan arah yang diprediksikan oleh teori disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Ringkasan Arah Pengaruh Variabel terhadap Kemiskinan

Variabel	Nama Variabel	Arah Koefisien	Signifikansi	Arah Teori
X1	Kredit	Negatif	Signifikan	Negatif

Variabel	Nama Variabel	Arah Koefisien	Signifikansi	Arah Teori
X2	PDRB	Positif	Tidak Signifikan	Negatif
X3	Pendidikan	Negatif	Signifikan	Negatif
X4	Pengangguran	Positif	Tidak Signifikan	Positif

Sumber : Hasil olah data panel Eviews, 2026

Dari empat variabel yang diuji, dua variabel (kredit dan pendidikan) menunjukkan arah dan signifikansi yang sepenuhnya konsisten dengan teori, satu variabel (pengangguran) konsisten arah namun tidak signifikan, dan satu variabel (PDRB) menunjukkan arah yang berlawanan dengan teori sekaligus tidak signifikan. Pola ini menegaskan bahwa kemiskinan di wilayah penelitian lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kapasitas ekonomi rumah tangga (akses pembiayaan dan pendidikan) dibandingkan oleh kondisi makroekonomi agregat, dan menjadi landasan empiris bagi rekomendasi kebijakan yang lebih menasar level mikro dan rumah tangga.

PENUTUP

Hasil analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* terhadap 34 Provinsi periode 2020-2024 menunjukkan bahwa kredit mikro dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga akses pembiayaan mikro dan peningkatan kualitas pendidikan terbukti menjadi determinan utama dalam menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, PDRB dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah penelitian belum sepenuhnya inklusif dan indikator pengangguran terbuka belum mampu menggambarkan kesejahteraan riil masyarakat, yang diduga terkait tingginya pekerja informal berproduktivitas rendah. Determinan mikro yang langsung menyentuh kapasitas rumah tangga, akses kredit dan pendidikan terbukti lebih konsisten menjelaskan variasi kemiskinan dibandingkan determinan makroekonomi agregat, sementara nilai *rho cross section random* yang tinggi menegaskan bahwa kemiskinan lebih dipengaruhi oleh karakteristik struktural antarwilayah, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan idealnya dirancang secara kewilayahan, buka diseragamkan secara nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi catatan bagi penelitian selanjutnya, yaitu rentang waktu data panel yang relatif pendek, serta belum dimasukkannya variabel kontrol lain seperti bantuan sosial, inflasi daerah, atau ketimpangan yang secara teoritis ikut memengaruhi kemiskinan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan waktu lebih panjang dan variabel kontrol yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Amaliah, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Per Kapita, Angka Kesakitan, Angka Perceraian, dan Persentase Penerima Kredit Usaha Rakyat terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2010-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 74–81. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.ID.10398>
- Alisjahbana, A. S., & Manning, C. (2006). Labour market dimensions of poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42(2), 235–261. <https://doi.org/10.1080/00074910600873674>
- Aliyah, T., Bahtiar, M. Y., & Zulaikah. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05(02), 491–508. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>

- Amanda, O., & Kunci, K. (2026). *Determinan Kemiskinan Sektor Pertanian pada Provinsi Termiskin Indonesia dalam Perspektif Panel Dinamis*. 9(2), 858–873.
- Amri, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Kredit Umkm Terhadap Tingkat Kemiskinan: Peran Pengangguran Sebagai Pemoderasi (Studi Komperatif Antar Wilayah Administratif Di Provinsi Sumatera Utara). *Sumatranomics*, 1–31.
- Apriliani, R. (2024). Analysis of The Relationship Between Economic Growth , Micro Credit Absorption by MSMEs , Government Capital Regulations and Financial Digital Literacy. *Innovative: Journal Of ...*, 4, 10197–10204. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11665%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/11665/7959>
- Aurellia, N. A., & Sirait, T. (2026). Economic growth, unemployment, poverty, and income inequality in Indonesia: Evidence from a simultaneous panel data approach. *TEKNOSAINS : Jurnal Sains, Teknologi Dan Informatika*, 13(1), 219–231. <https://doi.org/10.37373/tekno.v13i1.2057>
- Duong, H. A., & Nghiem, H. S. (2022). The impact of microfinance on poverty reduction in Vietnam: A dynamic panel-data analysis. *Poverty and Public Policy*, 14(4), 405–422. <https://doi.org/10.1002/pop4.354>
- Fakhrulrizqi, M. R., & Nuraulia, S. (2025). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan The Effect Of Financial Inclusion On Economic Growth , Income Inequality And Poverty : A Spatial Approach Across Provinces In Indonesia. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 4(1), 87–108.
- Firmansyah, R. A. F., & Mardiyah, D. (2026). Paradigma Baru Microfinance: Pergeseran Dari Subsidi Ke Komersialisasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 567–573. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.2002>
- Fitri Rizkiyah, T., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Peningkatan Kredit Bpr, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. *Gema Wiralodra*, 11(2), 311–326. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v11i2.135>
- Heriyanto, R., & Mariyanti, T. (2022). Poverty Alleviation Strategies Through Sharia Microfinance Institutions Politico-Economics Study With Tawhidi Approach. *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 6(2), 132–141. <https://doi.org/10.33050/atm.v6i2.1794>
- Imai, K. S., Gaiha, R., Thapa, G., & Annim, S. K. (2012). Microfinance and Poverty-A Macro Perspective. *World Development*, 40(8), 1675–1689. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.013>
- Ismail, M., Santoso, D. B., & Satria, D. (2024). Microfinance and Poverty in Indonesia: the Macro Impact of People’S Credit Bank. *Journal of Business Economics and Management*, 25(4), 647–664. <https://doi.org/10.3846/jbem.2024.22001>
- Komang, E. M., & I Wayan Sudemen. (2024). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(1), 68–77. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v9i1.92280>
- Prapti NSS, RR. L., Rahoyo, R., & Triyani, D. (2019). Pendekatan Holistik (Holistic Approach) Sebagai Upaya Efektif Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Miskin. *Solusi*, 17(2), 39–48. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1455>
- Prasetyo, P. E., & Kistanti, N. R. (2020). Human capital, institutional economics and entrepreneurship as a driver for quality & sustainable economic growth. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2575–2589. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(1\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(1))
- Ria, R., Hasibuan, A., Kartika, A., & Suwito, F. A. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Jural Ekonomi*, 4(3), 685. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.887>

- Riswana, N. (2026). Pengaruh Financial Deepening terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Studi Data Panel Provinsi 2011-2024). *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v7i1.77>
- Rusiadi, Abdiyanto, Desy Surya, E., Indah Sari, W., & Sitorus, A. P. (2025). Kebijakan Moneter Hijau, Inklusi Keuangan Digital, dan Kinerja Keuangan UMKM terhadap Pengurangan Kemiskinan Hijau di Indonesia: Analisis Empiris untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(3), 662–674. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i3.7246>
- Sulaeman, M. (2024). Economic Growth In Indonesia: Dynamics Of Poverty, Unemployment, And Health Budgets. *Agregat*, 2(1), 79–99. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Tang, R., Nogueira, R., Zhang, E., Gupta, N., Cam, P., Cho, K., & Lin, J. (2020). *Rapidly Bootstrapping a Question Answering Dataset for COVID-19*. 04, 550–567. <http://arxiv.org/abs/2004.11339>
- Thesia, D. Y., & Karmini, N. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(03), 271. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i03.p03>
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di jawa timur 1,2. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2), 1500–1511. <https://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/925%0Ahttp://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/download/925/557>
- Tran, T. K. (2023). Does Microfinancing, Financial Inclusion, and Educational Loans Alleviate Poverty and Inequality: Evidence From Vietnam. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(6), 1687–1707. <https://doi.org/10.3846/tede.2023.20348>
- Wahed, A. B. B. S. dan M. (2023). Pengaruh Rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup Serta Pdrb Per Kapita Terhadap Kemiskinan Melalui Analisis Jalur Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.234>
- Wirayudha, A. B., & Prasetyia, F. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Di 34 Provinsi Di Indonesia. 3(3), 763–779. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.08>